



BPKAD
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SUMATERA SELATAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan salah satu indikator pencapaian kinerja dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat gambaran capaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Sasaran Kinerja yang selaras dengan dokumen Rencana Strategis BPKAD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat atas pertanggungjawaban kinerja dalam peningkatan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Palembang, 03 Februari 2025
Kepala,



YOSSI HERVANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TK I /IVb
NIP. 198208162001121004

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Organisasi BPKAD Prov. Sumsel	3
Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis	9
Gambar 1.3 Tampilan Website BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	12
Gambar 2.1 Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	28
Gambar 2.2 Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Aset pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	28
Gambar 2.3 Tampilan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	29
Gambar 2.4 Tampilan Aplikasi e BMD.....	29
Gambar 3.1 Gambar Piagam Penghargaan Audit Sistem Kearsipan	53
Gambar 3.2 Gambaran Piagam ASN Inovatif	53

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.4 Peta Proses Bisnis.....	9
1.5 Sumber Daya Aparatur (SDA)	10
1.6 Sarana dan Prasarana.....	11
1.7 Sumber Daya Keuangan	13
1.8 Tindak Lanjut atas laporan Evaluasi SAKIP TA. 2023	16
1.9 Sistematika Penyajian	17
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026	18
2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	19
2.3 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	20
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan	22
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	27
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya	30
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024	30
3.3 Realisasi Anggaran	49
3.4 Inovasi	52
3.5 Penghargaan	52
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Langkah Strategis untuk Meningkatkan Kinerja pada masa Mendatang	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pegawai Berdasarkan Tempat Tugas, Golongan dan Jenis Kelamin	10
Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal	11
Tabel 1.3 Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	11
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional pada..... BPKAD Prov. Sumsel	12
Tabel 1.5 Sumber Daya Keuangan.....	13
Tabel 1.6 Permasalahan Utama	14
Tabel 1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	16
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026	20
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci.....	
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPKAD..... Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026	21
Tabel 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	23
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
Tabel 2.6 Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran BPKAD	27
Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	30
Tabel 3.2 Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja.....	31
Tabel 3.3 Indikator Tujuan dan Sasaran	32
Tabel 3.4 Target dan Realisasi BPKAD Tahun 2024	33
Tabel 3.5 Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2021- 2024	34
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra	36
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2024.....	38
Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	40
Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan...	41
Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kegiatan	47
Tabel 3.11 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja	49

BAB I PENDAHULUAN

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Perhubungan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

A. Gambaran Umum

1.1 Latar Belakang

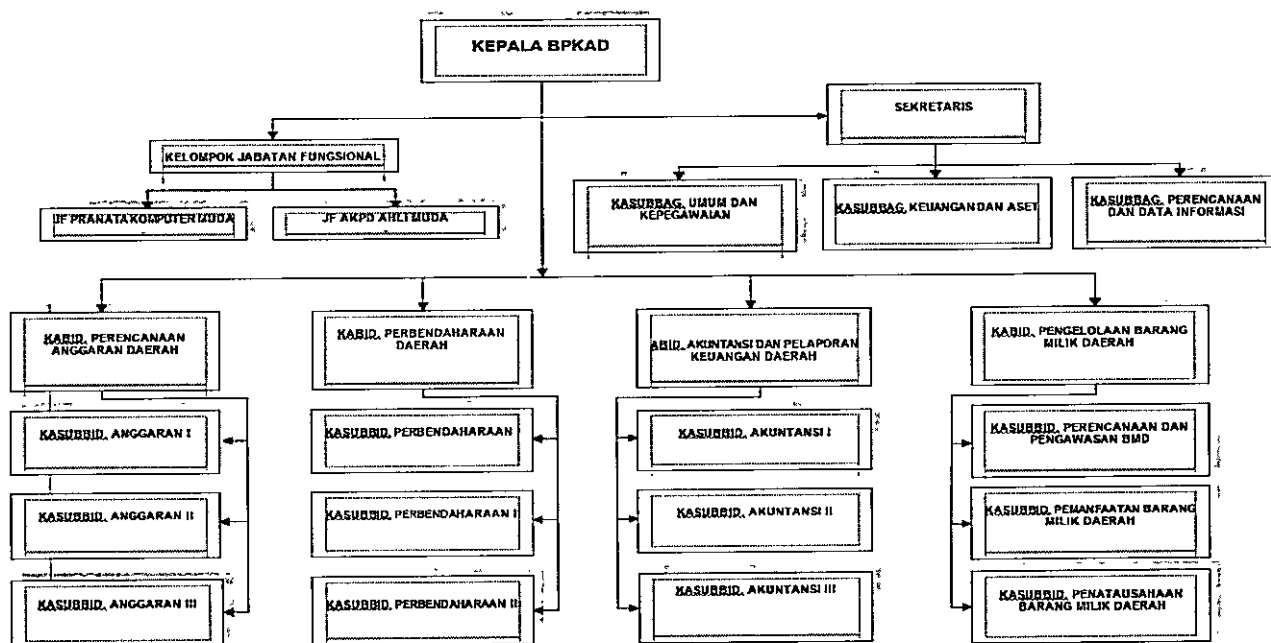
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Data Informasi
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
 - a. Sub bidang Anggaran I
 - b. Sub bidang Anggaran II
 - c. Sub bidang Anggaran III
4. Bidang Perbendaharaan Daerah
 - a. Sub bidang Perbendaharaan I
 - b. Sub bidang Perbendaharaan II
 - c. Sub bidang Perbendaharaan III
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - a. Sub bidang Akuntansi I
 - b. Sub bidang Akuntansi II
 - c. Sub bidang Akuntansi III
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Sub bidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah
 - b. Sub bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - c. Sub bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagian Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan



1.2 Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68);

- g. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026;
- h. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fungsi yaitu, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan dibantu oleh unsur Sekretariat dan Bidang. Adapun tugas dari masing-masing unsur sebagai berikut:

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA);
- 2) Pengkoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- 3) Pengkoordinasian penyusunan kebutuhan anggaran;
- 4) Pelaksanaan pengujian atas belanja dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

- 5) Penelitian konsep ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain;
- 6) Pelaksanaan administrasi utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD;
- 7) Pelaksanaan monitoring anggaran SKPKD;
- 8) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
- 9) Pengelolaan barang milik daerah;
- 10) Penyiapan administrasi permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- 11) Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah pada SKPKD;
- 12) Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada SKPKD;
- 13) Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPKD;
- 14) Penyiapan usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;
- 15) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah SKPKD;
- 16) Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) SKPKD;
- 17) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 18) Pengelolaan urusan rumah tangga;
- 19) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
- 20) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- 21) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 22) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- 23) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris dibantu Kepala Subbagian Perencanaan dan Data Informasi, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Subbagian Keuangan dan Aset.

b. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP, penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, mengkoordinasikan dan memverifikasi RKA, menyiapkan penerbitan SPD dan anggaran kas, serta menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP;
- 2) Pengkoordinasian Penyusunan RKA/DPA SKPD serta RKAP/DPPA SKPD;
- 3) Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
- 4) Penyusunan pedoman/petunjuk teknis penyusunan anggaran SKPD;
- 5) Pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- 6) Pengkoordinasian Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
- 7) Pengkoordinasian Perencanaan Anggaran Pembiayaan;
- 8) Penyediaan Anggaran Kas;
- 9) Pelaksanaan Evaluasi Apbd Kabupaten/Kota; Dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran dan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Anggaran I, Kepala Sub Bidang Anggaran II, dan Kepala Sub Bidang Anggaran III.

c. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas dan menyiapkan bahan pengolahan data keuangan daerah serta memfasilitasi dana transfer pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian pengelolaan kas daerah;
- 2) Pengkoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- 3) Pengkoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- 4) Pengkoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- 5) Pengkoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- 6) Pengkoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- 7) Pengkoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- 8) Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 9) Pengkoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- 10) Pengkoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- 11) Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- 12) Pengkoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Perbendaharaan daerah dan dibantu oleh Kepala Subbidang Perbendaharaan I, Kepala Subbidang Perbendaharaan II, dan Kepala Subbidang Perbendaharaan III.

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas

dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD, restitusi dan pelaporan keuangan daerah serta pembinaan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian akuntansi penerimaan daerah;
- 2) Pengkoordinasian akuntansi pengeluaran daerah;
- 3) Pengkoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah provinsi;
- 4) Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- 5) Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- 6) Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 7) Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah;
- 8) Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- 9) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan dibantu oleh Kepala Subbidang Akuntansi I, Kepala Subbidang Akuntansi II, dan Kepala Subbidang Akuntansi III.

e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, merencanakan dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- 2) Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan di perencanaan dan pengawasan barang milik daerah;
- 3) Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah;
- 4) Penyusunan dan melaksanakan kegiatan pemindah tanganan barang milik daerah;
- 5) Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah;
- 6) Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penatausahaan barang milik daerah;
- 7) Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penggunaan barang milik daerah;
- 8) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dibantu oleh Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah, Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

1.4 Peta Proses Bisnis

Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis



1.5. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan didukung dengan sumber daya yang cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dukungan sumber daya secara garis besar terdiri dari sumber daya aparatur yang terkait kepegawaian dan sumber daya terkait sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang operasional di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber daya aparatur yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah berjumlah 85 orang ASN dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pegawai Berdasarkan Tempat Tugas, Golongan dan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	GOLONGAN				JUMLAH SELURUH	JENIS KELAMIN	
		I	II	III	IV		LK	PR
1.	Sekretariat	-	1	14	3	17	9	8
2.	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	-	-	15	3	18	10	8
3.	Bidang Perbendaharaan Daerah	-	-	14	1	15	11	4
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	12	5	17	12	5
5.	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1	12	4	17	6	11
	Jumlah	-	2	67	16	85	49	36

Sumber Data : Data Pegawai per Bulan Desember 2024

Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	SLTP / Sederajat	-	-	-
2.	SLTA / Sederajat	-	-	-
3.	Sarjana Muda / Sederajat	5	3	8
4.	Sarjana S1	19	25	43
5.	Pasca Sarjana	14	19	33
	Jumlah	38	47	85

Sumber Data : Data Pegawai per Bulan Desember 2024

Tabel 1.3 Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

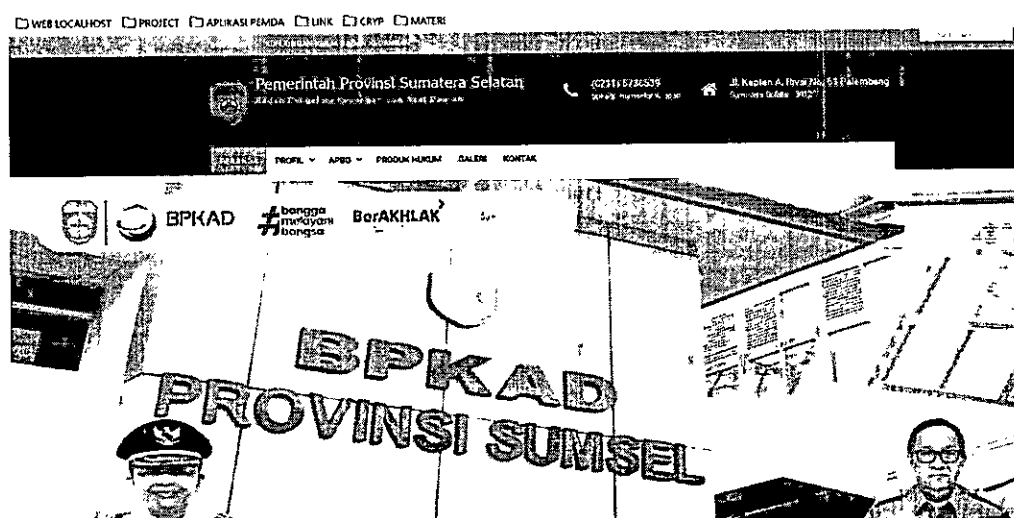
NO	ESSELONERING	JUMLAH		JUMLAH TOTAL	KETERANGAN
		LAKI-AKI	PEREMPUAN		
1.	II.a	1	-	1	Kepala Badan
2.	III.a	1	3	4	Sekretaris/Kepala Bidang
3.	III.b	-	-	-	-
4.	IV.a	11	5	15	Kasubbag
5.	Non Esselon	30	34	64	Staf
	Jumlah	43	42	85	

Sumber Data : Data Pegawai per Bulan Desember 2024

1.6 Sarana dan Prasarana

Sarana Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berupa sarana informasi portal berupa website dengan alamat akses <http://bpkad.sumselprov.go.id/> Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 1.3 Tampilan Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan



Adapun sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah	4	✓		
2	Gedung dan Bangunan	6	✓		
3	Kendaraan roda 4	24	✓		
4	Kendaraan roda 2	20	✓		
5	Personal Komputer	144	✓		
6	Laptop	62	✓		
7	Notebook	15	✓		
8	Air Conditioning	20	✓		
9	Printer	119	✓		
10	Scanner	11	✓		

11	Server	11	✓		
12	Router	46	✓		
13	Peralatan jaringan lain	2	✓		
14	Wireless	-	-		
15	Meja	121	✓		
16	Kursi	316	✓		
17	Lemari	26	✓		
18	Rak	6	✓		

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

1.7 Sumber Daya Keuangan

Tabel 1.5
Dukungan Anggaran Tahun Anggaran 2024
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

URAIAN	ANGGARAN INDUK TA. 2024	PERKADA KE I (Pergub. No. 1 Tahun 2024)	PERKADA KE II (Pergub. No. 8 Tahun 2024)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD TA. 2024
PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	314,055,917,094.00	314,055,917,094.00	314,055,917,094.00	587,855,917,094.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165,607,917,094.00	165,607,917,094.00	165,607,917,094.00	165,607,917,094.00
Lain-lain PAD yang Sah	148,448,000,000.00	148,448,000,000.00	148,448,000,000.00	422,248,000,000.00
PENDAPATAN TRANSFER	5,586,965,120,000.00	6,182,352,680,591.00	6,182,352,680,591.00	6,188,978,191,591.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5,586,965,120,000.00	6,182,352,680,591.00	6,182,352,680,591.00	6,188,978,191,591.00
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,743,253,000.00	3,743,253,000.00	3,743,253,000.00	4,018,968,000.00
Pendapatan Hibah	3,743,253,000.00	3,743,253,000.00	3,743,253,000.00	4,018,968,000.00
Jumlah Pendapatan	5,904,764,290,094.00	6,500,151,850,685.00	6,500,151,850,685.00	6,780,853,076,685.00

URAIAN	ANGGARAN INDUK TA. 2024	PERKADA KE I (Pergub. No. 1 Tahun 2024)	PERKADA KE II (Pergub. No. 8 Tahun 2024)	ANGGARAN PERUBAHAN APBD TA. 2024
BELANJA OPERASI	116,466,713,397.00	57,004,800,140.00	57,004,800,140.00	56,565,807,542.00
Belanja Pegawai	86,548,669,386.00	21,212,114,000.00	21,212,114,000.00	17,184,384,000.00
Belanja Barang dan Jasa	29,918,044,011.00	33,092,686,140.00	33,092,686,140.00	36,481,423,542.00
Belanja Bunga	-	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	2,900,000,000.00
BELANJA MODAL	3,300,000,000.00	4,915,007,402.00	4,915,007,402.00	5,354,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,600,000,000.00	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	4,689,000,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700,000,000.00	1,715,007,402.00	1,715,007,402.00	665,000,000.00
BELANJA TIDAK TERDUGA	200,349,631,847.00	100,000,000,000.00	64,620,805,000.00	21,794,414,409.00
Belanja Tidak Terduga	200,349,631,847.00	100,000,000,000.00	64,620,805,000.00	21,794,414,409.00
BELANJA TRANSFER	3,831,001,899,197.00	4,323,406,198,890.00	4,325,406,198,890.00	4,547,145,620,161.00
Belanja Bagi Hasil	2,227,174,098,112.00	1,984,619,153,254.00	1,984,619,153,254.00	2,048,348,574,525.00
Belanja Bantuan Keuangan	1,603,827,801,085.00	2,338,787,045,636.00	2,340,787,045,636.00	2,498,797,045,636.00
Jumlah Belanja	4,151,118,244,441.00	4,485,326,006,432.00	4,451,946,811,432.00	4,630,859,842,112.00
Total Surplus/ Defisit)	1,753,646,045,653.00	2,014,825,844,253.00	2,048,205,039,253.00	2,149,993,234,573.00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289,311,076,688.00	289,311,076,688.00	289,311,076,688.00	289,311,076,688.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289,311,076,688.00	289,311,076,688.00	289,311,076,688.00	289,311,076,688.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	289,311,076,688.00	289,311,076,688.00	289,311,076,688.00	289,311,076,688.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	139,000,000,000.00	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00	105,000,000,000.00
Penyerahan Modal Daerah	139,000,000,000.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	105,000,000,000.00	105,000,000,000.00	105,000,000,000.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	139,000,000,000.00	135,000,000,000.00	135,000,000,000.00	105,000,000,000.00
Pembiayaan Neto	150,311,076,688.00	154,311,076,688.00	154,311,076,688.00	184,311,076,688.00

Sumber Data : Ringkasan DPA dan DPA Perubahan BPKAD TA. 2024

B. Permasalahan Utama

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.6 Permasalahan Utama

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Opini Laporan Keuangan Daerah	Mempertahankan Opini WTP	Perlunya pembinaan staf dalam mempertahankan WTP
2	Pelatihan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis	SDM yang berminat mengikuti pelatihan teknis
3	Aset-aset Provinsi Sumsel yang belum bersertifikat	Aset yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se-Sumsel	Status kepemilikan aset tanah tanah yang tumpang tindih dengan pihak lain

4	TP-TGR yang belum terselesaikan.	TP-TGR yang lama belum terselesaikan	Banyaknya ASN dan Pegawai Pensiunan yang tidak disiplin membayar hutang TP-TGR
5	Sarana dan prasarana kerja	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Sarana dan prasarana belum ada gedung kantor yang tetap
6	Disiplin aparatur	Kurangnya disiplin aparatur	Kurangnya pembinaan terhadap aparatur

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Berdasarkan analisis kritikal tersebut maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

1. Bagaimana mensosialisasikan segera peraturan baru dibidang keuangan dan aset daerah.
2. Bagaimana mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
3. Bagaimana meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kab/Kota secara periodik.
4. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM.
5. Bagaimana meningkatkan Optimalisasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.
6. Bagaimana menerapkan pembentukan satuan tugas khusus penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan.
7. Bagaimana meningkatkan daya dukung sarana prasarana.
8. Bagaimana meningkatkan koordinasi antara BPKAD dengan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bagaimana meningkatkan disiplin pegawai.

1.8 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel 1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	REALISASI
1.	Agar dalam dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dapat secara keseluruhan menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;	Bahwa Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 telah menyajikan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai seperti tertera pada TC 26 (Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan) dan TC. 27 (Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BPKAD Prov. Sumsel). Adapun Kedepannya akan dilakukan penyesuaian kembali, menyelaraskan dengan RPJMD dan Visi Misi	Dokumen Renstra BPKAD Tahun 2024-2026
2.	Agar nilai rata-rata target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai, menantang, dan realistis dengan nilai lebih dari 90%, dimana target minimal yang ditetapkan pada Renja sesuai dengan RPJMD atau Renstra, target provinsi, dan RPJMN, bahwa nilai rata-rata target yang ditetapkan dan RKPD/Renja berupa tabel target indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis dapat dicapai, menantang, dan realistis, sebagai tindak lanjut dari target kinerja dalam RPJMD/Renstra Perangkat Daerah.	Dokumen Perencanaan kinerja baik untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang akan terus diupayakan agar nilai rata-rata target yang ditetapkan dapat tercapai dengan nilai lebih dari 90% sesuai dengan tujuan dan sasaran Strategis BPKAD Tahun 2024-2026 yaitu Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas dengan Indikator Tujuan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Realisasi Kinerja Tahun 2024 mencapai 98,63%	Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
3	Agar keseluruhan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai jika aktifitas-aktifitas yang dilakukan merupakan pengejawantahan upaya pencapaian target kinerja dimana pengecekan rencana aksi sudah memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulan untuk mendukung kinerja.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulan untuk mendukung kinerja. Yang terdiri dari : 1. Undangan Rapat Monev dan Absen 2. Laporan Monev Perbidang 3. Notulen Rapat	Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi per triwulan.
4	Agar seluruh satuan organisasi memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, dimana setiap pegawai membuat dan menandatangani laporan evaluasi atas SKP ditandatangani atasan secara berjenjang sebagai wujud komitmen dalam pencapaian target kikerja, pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN setiap bulan, triwulan, semester.	Setiap pegawai membuat dan menandatangani laporan evaluasi atas SKP ditandatangani atasan secara berjenjang sebagai wujud komitmen dalam pencapaian target kikerja, pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN setiap bulan, triwulan, semester.	Dokumen SKP yang ditandatangani setiap bulan, triwulan, semester.
5	Agar Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan didukung dengan dokumen bukti seperti rapat penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan monitoring evaluasi (monev) selalu dihadiri dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan setiap triwulan.	Dokumen LKJIP dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi per triwulan

1.9 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV TA 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Esensi dari sistem AKIP bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik dalam kegiatan. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan bahwa sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja (RENJA) dapat dipenuhi. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disusun berdasarkan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penunjang Pemerintah di bidang Keuangan dan Aset Daerah, perlu menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pelaksanaan tugas lainnya diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bahwa Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan masa transisi jabatan gubernur dan wakil gubernur yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023, sehingga perencanaan ini dapat menjadi acuan dan pedoman Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi selama periode Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan sebagai jembatan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang masa jabatan Kepala daerah yang berakhir di tahun 2023 untuk memberikan arah pembangunan bagi *stakeholders* dan perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan tahunan.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan landasan dan pedoman Penjabat Gubernur dalam melaksanakan pembangunan di Tahun 2024-2026;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 2024-2026;
3. Mendukung Upaya Pencapaian kesejahteraan bersama melalui senergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan didalam satu pola strategi dan tindakan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan,

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai *leading sector* perwujudan tata kelola keuangan dan aset daerah, tentunya harus dapat menjadi penggerak utama untuk Perangkat Daerah lainnya dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik pada Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BPKAD untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah.

2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2018	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

2.3 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024-2026

	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2018	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1.1.	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	1.1.1 Penganggaran yang baik	- Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			- <i>Budget Execution</i> : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	-5% s.d. 0%	-5% s.d. 0%	-5% s.d. 0%
		1.1.2. Penatausahaan Keuangan yang Baik	- Persentase dokumen pencairan yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	100%	100%	100%
		1.1.3. Pelaporan Keuangan yang Baik	- Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	WTP	WTP	WTP
		1.1.4. Pengelolaan Aset Yang Baik	- <i>Asset Management</i>	100%	100%	100%
1.2.	Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah		- Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	100%
		1.2.1. APBD Kabupaten/Kota yang Baik	- Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	100%	100%	100%
		1.2.2. Persentase Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang Baik	- Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu	100%	100%	100%

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 serta tujuan dan sasaran BPKAD, setiap tahunnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD dan Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2026. Berdasarkan dokumen Renja BPKAD Tahun 2024, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, BPKAD memiliki 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ketiga program tersebut didukung oleh 13 (tiga belas) Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
9. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
12. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Adapun Strategi dan Arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
	1.	Penganggaran yang Baik	1.1	Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPASP yang baik	1.1.1	Menyusun Rancangan KUA PPAS dan KUPA PPASP APBD yang tepat waktu
Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas			1.2	Penyusunan APBD dan APBDP yang baik	1.2.1	Menyusun Perda/Pergub Penjabaran APBD yang tepat waktu
	2.	Penatausahaan Keuangan yang Baik	2.1	Pengelolaan Pengeluaran Keuangan yang baik	2.1.1	Mengelola pengeluaran keuangan sesuai dengan sistem dan prosedur
			2.2	Pengelolaan Kas Daerah yang baik	2.2.1	Mengelola kas daerah sesuai dengan manajemen kas
	3.	Pelaporan Keuangan yang Baik	3.1	Pertanggungjawaban APBD yang baik	3.1.1	Merealisasikan belanja sesuai target APBD
			3.2	Laporan Keuangan yang baik	3.2.1	Memverifikasi Laporan Keuangan OPD
	4.	Pengelolaan Aset Yang Baik	4.1	RKBMD yang baik	4.1.1	Menyusun RKBMD yang sesuai Renja
				Verifikasi BMD yang baik		Memverifikasi BMD secara optimal
				Monitoring BMD yang baik		Melaksanakan Pengawasan BMD secara maksimal
				Penyusunan SK MoU BMD dan Perjanjian Kerjasama BMD		Menyusun SK MoU BMD dan Perjanjian Kerjasama BMD secara maksimal
				Penyusunan SK penghapusan BMD		Menyusun SK penghapusan BMD secara optimal
				Penyusunan SK pemindahtanganan BMD		Menyusun SK pemindahtanganan BMD secara optimal
				Penyusunan Laporan BMD yang sudah divalidasi		Memvalidasi laporan BMD dengan baik
				Rekonsiliasi BMD dengan OPD		Merekonsiliasi BMD secara optimal

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.	APBD Kabupaten/Kota yang Baik	1.1	Tersusunnya APBD/P Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	1.1.1	Menyusun Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
			1.2	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kab/Kota	1.2.1	Menyusun Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kabupaten/Kota
	2.	Persentase Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang baik	2.1	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban APBD kab/Kota yang tepat waktu dan benar	2.1.1	Menyusun Keputusan Gubernur untuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
			2.2	Terlaksananya rapat koordinasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/kota yang optimal	2.2.1	Menyusun Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *outcome* selain *output* dan harus ada saling keterkaitan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan Target Kinerja dimaksud.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	1.1 Penganggaran yang Baik	Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			<i>Budget Execution</i> : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	%	-5% s.d. 0%
		1.2 Penatausahaan Keuangan yang Baik	Persentase dokumen pencairan yang baik sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	%	100
		1.3 Pelaporan Keuangan yang Baik	Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	WTP	WTP
		1.4 Pengelolaan Aset Yang Baik	<i>Assets Management</i>	%	100
			Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penatausahaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Data Informasi, Keuangan dan Aset yang baik pada BPKAD Prov. Sumsel	Persentase Tertibnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Data Informasi, Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Daerah Tepat Waktu	%	100
2	Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.1 APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	%	100
		2.2 Persentase Laporan Pertanggung jawaban APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu		

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka pada tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan 1 (satu) program rutin dengan 7 (tujuh) kegiatan serta 2 (dua) program reguler untuk menunjang bidang keuangan dan aset melalui 6 (enam) kegiatan yang dibiayai melalui Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp4.630.859.842.112,00** (*Empat triliun enam ratus tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus dua belas rupiah*), yang diuraikan pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran BPKAD

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran Induk TA. 2024	Anggaran Perubahan APBD TA. 2024
1	2	3	4	5	7
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	104,108,313,397.00	43,627,468,413.00
	i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	389,500,000.00	1,449,180,000.00
	ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	89,353,236,386.00	21,618,223,000.00
	iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1,040,000,000.00	876,028,000.00
	iv Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	343,250,000.00	1,068,900,000.00
	v Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	8,134,000,000.00	12,859,883,000.00
	vi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,552,800,000.00	1,504,800,000.00
	vii Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,295,527,011.00	4,250,454,413.00
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	APBD Yang Tepat Waktu	Tepat Waktu	4,040,759,531,044.00	4,581,409,798,699.00
	i Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	4,315,000,000.00	4,586,850,000.00
	ii Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,133,000,000.00	1,620,692,000.00
	iii Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	2,798,000,000.00	1,929,722,129.00
	iv Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	1,162,000,000.00	1,432,500,000.00
	v Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan	100%	4,031,351,531,044.00	4,571,840,034,570.00
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	6,250,400,000.00	5,822,575,000.00
	i Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan barang Milik Daerah	100%	6,250,400,000.00	5,822,575,000.00
Jumlah				4,151,118,244,441.00	4,630,859,842,112.00

Sumber Data : Ringkasan DPA dan DPA Perubahan BPKAD Tahun 2024

2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

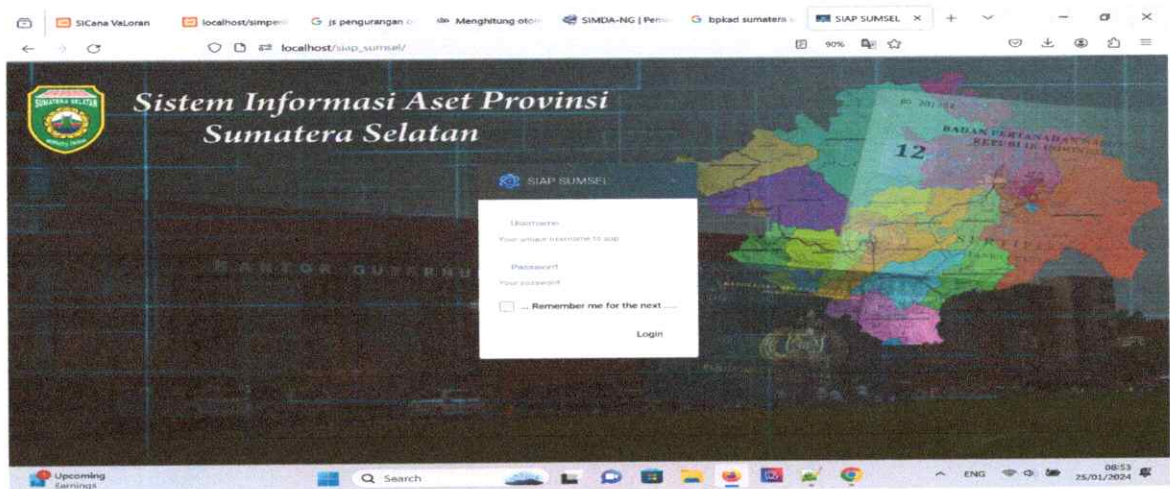
Untuk mendukung pengukuran capaian kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan, utamanya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan membuat Laporan Konsolidasi yang menggambarkan realisasi keuangan dan realisasi fisik per bulan. Adapun teknis pengumpulan data dilakukan dengan rapat monitoring dan evaluasi tiap triwulan yang dipimpin oleh Kepala Badan/Sekretaris Perangkat Daerah dengan menghadirkan para Pelaksana Kegiatan/PPTK masing-masing bidang.

Gambar 2.1
Contoh Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV BPKAD
Provinsi Sumatera Selatan



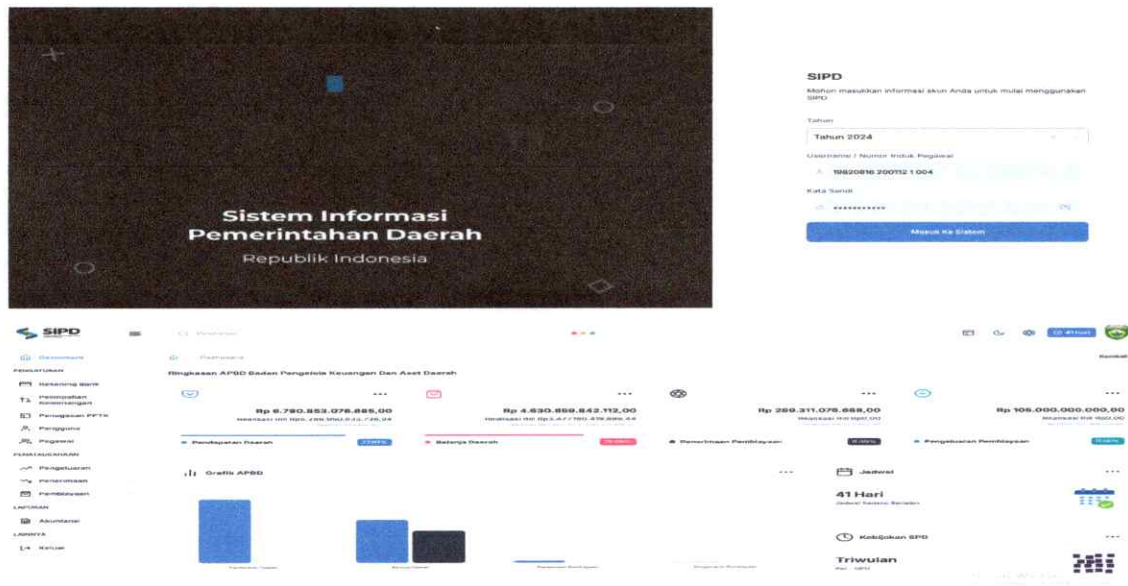
Selain itu, guna peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Aset Provinsi, E-BMD serta Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI).

Gambar 2.2
Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Aset pada BPKAD
Provinsi Sumatera Selatan



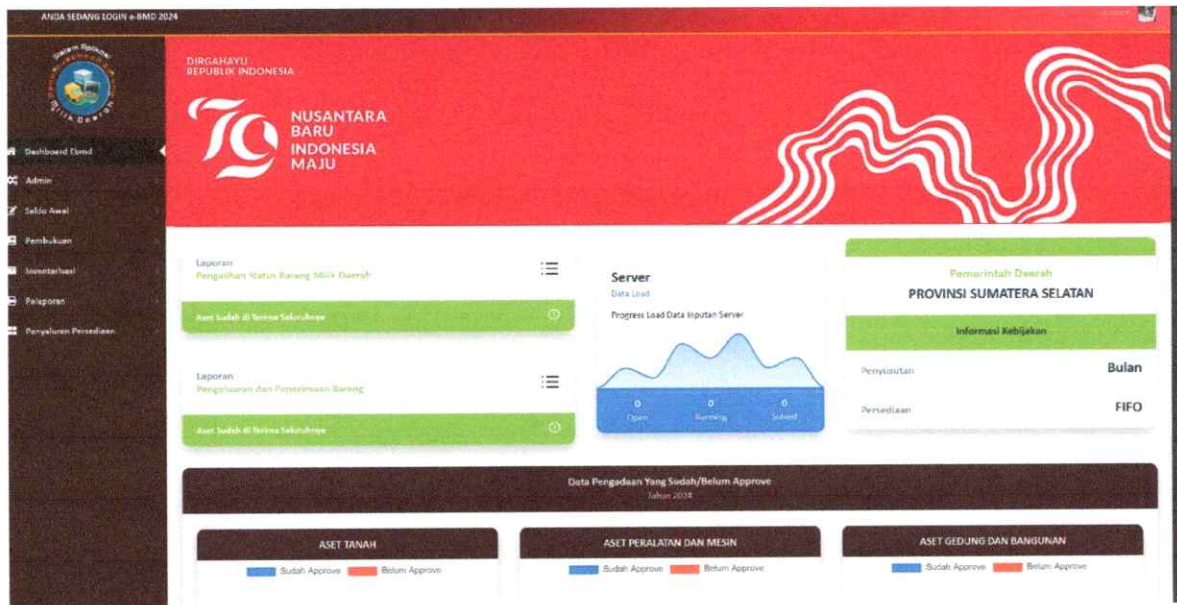
Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Aset

Gambar 2.3
Tampilan Sistem Informasi Pemerintah Daerah



Sumber : Aplikasi SIPD RI

Gambar 2.4
Tampilan Aplikasi e BMD



Sumber : Aplikasi e BMD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
			2021	2022			2023
1	Perencanaan Kinerja	30	23,96	26,74	Perencanaan Kinerja	30	27,70
2	Pengukuran Kinerja	25	20,00	18,75	Pengukuran Kinerja	30	30,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12,45	11,99	Pelaporan Kinerja	15	14,16
4	Evaluasi Internal	10	7,23	5,58	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,79
5	Capaian Kinerja	20	12,63	13,60			
Total Nilai			76,27	76,60			91,65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		100	BB	BB		100	AA

Pada tabel 3.1 dapat dilihat nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan mengalami peningkatan dengan hasil akhir diperoleh tingkat akuntabilitas kinerja BPKAD Provinsi Sumatera selatan yang semula pada tahun 2021 dan tahun 2022 berkategori BB menjadi kategori AA pada tahun 2023.

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber Data : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran Perangkat daerah, telah ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Indikator Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	1.1 Penganggaran yang Baik	Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu <i>Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD</i>
		1.2 Penatausahaan Keuangan yang Baik	Persentase dokumen pencairan yang baik sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu
		1.3 Pelaporan Keuangan Baik	Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen
		1.4 Pengelolaan Aset Baik	Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku <i>Asset Management</i>
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penatausahaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Data Informasi, Keuangan dan Aset yang baik pada BPKAD Prov. Sumsel	Persentase Tertibnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Data Informasi, Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Daerah Tepat Waktu
	Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar
		Persentase Laporan Pertanggung- jawaban APBD Kabupaten/Kota yang Baik	Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan pada sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 diperoleh melalui analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja BPKAD
sampai dengan **31 Desember 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja (%)	Capaian Fisik (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang	1,1 Penganggaran yang Baik	Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	-5% s.d.0%	-3,79%	-	Sesuai
		1,2 Penatausahaan Keuangan yang Baik	Persentase dokumen pencairan yang baik sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	100%	99	99,38%	Sangat Tinggi
		1,3 Pelaporan Keuangan yang Baik	Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	WTP	Proses Penyusunan Laporan Keuangan	Proses Penyusunan Laporan Keuangan	-
		1,4 Pengelolaan Aset Yang Baik	Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	97	97,78%	Sangat Tinggi
			Asset Management				
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penatausahaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Data Informasi, Keuangan dan Aset yang baik pada BPKAD Prov. Sumsel	Persentase Tertibnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Data Informasi, Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Daerah Tepat Waktu	100%	100	98,57%	Sangat Tinggi
2	Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	2,1 APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	100%	99	99%	Sangat Tinggi
		2,2 Persentase Laporan Pertanggung jawaban APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	Laporan Pertanggung jawaban APBD APBD Kab/Kota yang tepat waktu				

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV TA.2024

Berdasarkan tabel 3.4 bahwa berdasarkan Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja BPKAD termasuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi”, namun terhadap Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen masih dalam proses penyusunan Laporan Keuangan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.5

Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2021- sampai dengan 31 Desember 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	- Penganggaran yang Baik	- Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			- Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	-5% s.d. 0%	5.23%	5.23%	-5% s.d. 0%	0.05%	0.05%	-5% s.d. 0%	7.17%	7.17%	-5% s.d. 0%	-3.79	-3.79
		- Penatausahaan Keuangan yang Baik	- Persentase dokumen pencatatan yang baik sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	100%	73.17	73.17%	100%	94.92	94.92%	100%	88.50	88.82%	100%	99	99.38%
			- Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Penyusunan Laporan Keuangan	Proses Penyusunan Laporan Keuangan
		- Pengelolaan Aset Yang Baik	- Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100	97.57%	100%	100	100%	100%	93	93.74%	100%	97	97.78%
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penatausahaan Administrasi Umum, Kepegawain, Data Perencanaan, Data Informasi, Keuangan dan Aset yang baik pada BPKAD Prov. Sumsel	- Asset Management - Persentase Terlibnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Data Informasi, Administrasi Umum, Kepegawain, Keuangan dan Aset Daerah Tepat Waktu	100%	99.21	99.21%	100%	99.40	99.40%	100%	95%	95.89%	100%	100	98.57%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Target	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
2.	Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	- APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	- Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	100%	100	100%	100%	98.07	98.07%	100%	95	95%	100%	99	99%
		- Persentase Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	- Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu												

Sumber Data : Rencana Strategis TA 2024-2026 BPKAD, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV TA.2024

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan pada indikator kinerja. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD berhasil mempertahankan WTP yang ke 10 (sepuluh) kali dan Penyusunan APBD yang tepat waktu.

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra BPKAD

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	=5/6 x 100
1.	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	- Penganggaran yang Baik	Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			<i>Budget Execution</i> : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	-3,79%	-5% s.d. 0%	-3,79%
		- Penatausahaan Keuangan yang Baik	- Persentase dokumen pencairan yang baik sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	99,38%	100%	99,38%
		- Pelaporan Keuangan yang Baik	- Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	Proses Penyusunan Laporan Keuangan	WTP	Proses Penyusunan Laporan Keuangan
		- Pengelolaan Aset Yang Baik	Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	97,78%	100%	97,78%
			- <i>Asset Management</i>			
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	- Penatausahaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Data Informasi, Keuangan dan Aset yang baik pada BPKAD Prov. Sumsel	- Persentase Tertibnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Data Informasi, Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Daerah Tepat Waktu	98,57%	100%	98,57%
2.	Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	- APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	- Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	99%	100%	99%
		- Persentase Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	- Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu			

Data : Rencana Strategis BPKAD TA 2024-2026, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.6 yang menunjukkan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Tahun 2024. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya untuk memenuhi target akhir Rencana Strategis Tahun 2026, antara lain melalui perbaikan dokumen perencanaan, monitoring kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan evaluasi internal secara periodik melalui pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.7 menunjukkan analisis keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Berdasarkan tabel tersebut, indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan capaian kinerja hampir 100%. Pada Program Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah telah melaksanakan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Workshop dan Sosialisasi terkait penatausahaan keuangan yang baik. Melakukan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja, Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD, Penyusunan Laporan Keuangan LKPD *Unaudited* dan Penyusunan Laporan Keuangan *Audited*.

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dilakukan Penerapan E-BMD, mengadakan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan monitoring evaluasi kinerja secara optimal guna perbaikan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja. Berdasarkan Laporan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2023 antara lain BPKAD Provinsi Sumatera Selatan agar melakukan pengecekan rencana aksi yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulan untuk mendukung kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja BPKAD
sampai dengan 31 Desember 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Fisik (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	- Penganggaran yang Baik	Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Melaksanakan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
			Budget Execution : - Deviasi Realisasi Terhadap Belanja Total Dalam APBD	-5% s.d. 0%	-3,79%	-3,79%		
		- Penatausahaan Keuangan yang Baik	- Persentase dokumen pencairan yang baik sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	100%	99	99,38%	Penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Workshop dan Sosialisasi terkait penatausahaan keuangan yang baik	
			- Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	WTP	Proses Penyusunan Laporan Keuangan	Proses Penyusunan Laporan Keuangan	Melakukan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja, Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD, Penyusunan Laporan Keuangan LKPD Unaudited dan Penyusunan Laporan Keuangan Audited	
		- Pengelolaan Aset Yang Baik	- Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	97	97,78%	Penerapan E-BMD, mengadakan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan barang Milik Daerah, Bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	
			- Asset Management	100%				

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Fisik (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	- Penalausahaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Data Informasi, Keuangan dan Aset yang baik pada BPKAD Prov. Sumsei	- Persentase Tertibnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Data Informasi, Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Daerah Tepat Waktu	100%	100	98,57%	Melakukan monitoring evaluasi kinerja secara optimal guna perbaikan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja	
2.	Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	- APBD Kabupaten/ Kota yang Baik - Persentase Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	- Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar - Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu	100%	99	99%	Melaksanakan proses evaluasi Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV TA.2024

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi Kinerja	Capaian Fisik (%)	Target (P-APBD TA. 2024)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 100 - 9
1.	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	- Penganggaran yang Baik	100%	63%	63,00%	4.586.850.000,00	4.270.286.461,00	93,10%	6,90%
		Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	-5% s.d. 0%	-3,79%	-3,79%				
		- Penatausahaan Keuangan yang Baik	100%	99%	99,38%	4.573.769.756.699,00	4.300.947.633.747,25	94,04%	5,96%
		- Pelaporan Keuangan yang Baik	100%	100	100,00%	1.432.500.000,00	1.316.268.417,00	91,89%	8,11%
		- Pengelolaan Aset Yang Baik	100%	97	97,78%	5.822.575.000,00	4.749.520.936,00	81,57%	18,43%
2.	Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asset Management	100%						
		- Penatausahaan Umum, Perencanaan, Data Informasi, Keuangan dan Aset yang baik pada BPKAD Prov. Sumsel	100%	100	98,57%	43.627.468.413,00	42.000.528.402,00	96,27%	3,73%
		- APBD Kabupaten/ Kota yang Baik							
		- Persentase Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	100%	99	99%	1.620.692.000,00	1.506.852.127,00	92,98%	7,02%
			TOTAL.....			4.630.859.842.112,00	4.354.791.090.090,25	94,04%	5,96%

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV TA.2024

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		% TARGET	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN	PERUBAHAN APBD TA. 2024	REALISASI	% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	7	8	9	10=100-9	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	99	99,55%	4.581.409.798.699,00	4.308.041.040.752,25	94,03%	5,97%	
2	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%	4.586.850.000,00	4.270.286.461,00	93,10%	6,90%	
3	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	99	99%	1.620.692.000,00	1.506.852.127,00	92,98%	7,02%	
4	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	100	100%	1.929.722.129,00	1.672.947.961,00	86,69%	13,31%	
5	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	98	98,75%	4.571.840.034.570,00	4.299.274.685.786,25	94,04%	5,96%	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
6	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	97	97,78%	5.822.575.000,00	4.749.520.936,00	81,57%	18,43%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
7	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%	1.449.180.000,00	1.439.560.950,00	99,34%	0,66%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		% TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PERUBAHAN APBD TA. 2024	REALISASI	% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	7	8	9	10=100-9	
8	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100%	21.618.223.000,00	20.632.548.375,00	95,44%	4,56%	
9	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100%	876.028.000,00	708.644.645,00	80,89%	19,11%	
10	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	90	90%	1.068.900.000,00	940.099.400,00	87,95%	12,05%	
11	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100%	12.859.883.000,00	12.754.658.942,00	99,18%	0,82%	
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	1.504.800.000,00	1.379.132.666,00	91,65%	8,35%	
13	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	4.250.454.413,00	4.145.883.424,00	97,54%	2,46%	
		TOTAL			4.630.859.842.112,00	4.354.791.090.090,25	94,04%	5,96%	

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV TA.2024

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melakukan perhitungan dengan perhitungan yaitu 100% dikurangi (Realisasi Anggaran dibagi Pagu Anggaran) x 100% (Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Apabila hasil perhitungan tersebut lebih besar dari 1 (satu) maka tingkat efisiensinya tinggi, begitu pula sebaliknya. Pada Tabel 3.8 (Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran) dan Tabel 3.9 (Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan) diatas, bahwa sampai dengan akhir tahun 2024 Tingkat Efisiensi secara keseluruhan mencapai 5,96%. Dengan realisasi anggaran yang rata-rata diatas 90%. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan mampu mencapai indikator kinerja dengan kategori sangat baik ($\geq$ 91%).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan tabel 3.10, program dan kegiatan yang terdapat di BPKAD telah menunjang tujuan dan sasaran strategis BPKAD. Hal ini dapat terlihat dari hampir semua capaian program dan kegiatan di BPKAD telah mencapai 100%.

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Terdapat kegiatan yang belum tercapai 100% yaitu Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 99%, hal tersebut dikarenakan pada pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota untuk Induk TA. 2025, terdapat 1 (satu) kabupaten yaitu Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Nomor 900/1272/XL.2/2024 tanggal 2 Desember 2024. Disebutkan bahwa Alat Kelengkapan Dewan (AKB belum dibentuk), sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak dapat memenuhi dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2025.

Sedangkan untuk Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA. 2024, terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu Kabupaten Empat Lawang berdasarkan surat Nomor 900/1012/BPKAD/2024 tanggal 15 Oktober 2024, Kabupaten OKU Selatan berdasarkan surat Nomor 900/1299/BPKAD-II/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dan Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan surat Nomor 900/996/XL.2/2024 tanggal 7 Oktober 2024.

Selanjutnya pada kegiatan Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan capaian sebesar 95%, hal ini disebabkan Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada akhir tahun anggaran sehingga tidak dapat diproses pada tahun berkenaan dan kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak hal ini disebabkan tidak ada realisasi untuk Pembebanan Langsung karena tidak ada permohonan dari OPD untuk penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Meskipun terdapat kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum mencapai target tetapi semua program/kegiatan pada Program pengelolaan keuangan daerah masih dapat menunjang tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara berkala tiap tahun sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, terus melaksanakan kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, koordinasi dan bimbingan kepada seluruh SKPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaiannya. Adapun Sosialisasi yang telah dilakukan adalah Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Legislatif Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya, dari pelaksanaan belanja, serapan dari seluruh SKPD dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan optimalisasi alokasi anggaran yang diberikan, untuk mencapai target kinerja yang baik oleh pengguna anggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemanfaatan dan atau pergeseran alokasi anggaran dari kegiatan/belanja tertentu ke sub kegiatan/belanja yang mendukung pencapaian kinerja turut andil dalam optimalisasi serapan anggaran.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian keuangan/bendahara di seluruh SKPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut. Adapun yang telah dilakukan seperti Sosialisasi Penerapan Pelaksanaan Penyerahan Kartu Kredit, Pemerintah Daerah (KKPD) dan Transaksi Non Tunai untuk Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga diharapkan tepat waktu seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling lambat 30 Juni tiap tahunnya.

Di lain pihak, selaku pembina pengelolaan keuangan daerah pada 17 kabupaten/kota, ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kabupaten/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta tindaklanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan, bersama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota semakin baik.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terdapat satu indikator kinerja Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang hanya mencapai 80%, yaitu Pengamanan Barang Milik Daerah. Hal ini disebabkan karena terdapat pemagaran lahan yang terletak di kawasan Jakabaring yang tidak terlaksana karena klaim dari masyarakat yang mengakui lahan tersebut sehingga berpotensi akan menjadi konflik.

Adapun kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2024 terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

1. Untuk mengolah Data Barang Milik Daerah, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Aplikasi e-BMD yang mencakup inventarisasi, penatausahaan, pemanfaatan dan pelaporan.
2. Dalam hal pengamanan hukum (sertifikasi tanah) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuat kesepakatan bersama dengan Kanwil ATR-BPN Sumsel. Adapun sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 764 sertifikat tanah telah diselesaikan.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Provinsi, yaitu : 1 (satu) buah mobil Land Cruiser Tahun 2009 Nomor Polisi BG 1145 MZ, Tanah Jakabaring, Aset Jalan Lingkar Istana, Aset Jalan Seruduk Putih, Aset Tanah dan Bangunan di Bandung dan Jogjakarta, Penjualan Aset Yayasan Batanghari Sembilan di Yogyakarta, Tanah di Jalan Mayor Ruslan.
4. Melakukan optimalisasi BMD dengan pola pemanfaatan sehingga bisa menambah PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, dalam Pengelolaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera terus melakukan upaya yang lebih intensif dan profesional sehingga didapatkan data aset yang akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta menyelamatkan aset dari kehilangan dan penguasaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

- c. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi rata-rata di atas 100%. Beberapa upaya yang telah maupun akan dilakukan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi, perbaikan dokumen perencanaan, monitoring kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, dan evaluasi internal secara periodik melalui pengarahan dan pengorganisasian kegiatan yang diharapkan dapat menunjang capaian indikator kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

- d. **Budget Execution** : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebesar minus 3,79% mengalami penurunan sebesar 4,08% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 6,87%.

Hal ini menunjukkan pengelolaan pendapatan dan belanja tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya, karena dana APBD lebih banyak terserap ke masyarakat daripada tersimpan di kas daerah. Hal yg sama ditunjukkan oleh penurunan SILPA Tahun 2024 yang lebih kecil dari SILPA Tahun 2023 yang artinya target SILPA APBD tercapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	APBD yang tepat Waktu	Tepat Waktu	Menunjang
		- Persentase Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	-5% s.d. 0%	- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	
		- Persentase dokumen pencairan yang baik sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	100%	- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	
		- Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	WTP	- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan	98,75%	
		- Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Proses Penyusunan Laporan Keuangan	
		Asset Management		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan barang Milik Daerah	97,78%	
				- Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Pengelolaan barang Milik Daerah	97,78%	

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
		- Persentase Tertibnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Data Informasi, Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Daerah Tepat Waktu	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi - Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah - Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,57% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100%	Menunjang
2.	Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	- Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar - Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	APBD Kabupaten/ Kota yang Baik - Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar dan Persentase Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	99%	Menunjang

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV TA.2024

3.3 Realisasi Anggaran

Tabel 3.11
Tabel Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu P-APBD (Rp)	Realisasi	Sisa Anggaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)		
					Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.627.468.413,00	42.000.528.402,00	1.626.940.011,00	100	100	98,57
	i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.449.180.000,00	1.439.560.950,00	9.619.050,00	100	100	100
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	177.000.000,00	176.465.000,00	535.000,00	1 Laporan	1 Laporan	100
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.272.180.000,00	1.263.095.950,00	9.084.050,00	8 Laporan	8 Laporan	100
	ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.618.223.000,00	20.632.548.375,00	985.674.625,00	100	100	100
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.104.354.000,00	15.623.447.816,00	480.906.184,00	85 ASN/Bulan	85 ASN/Bulan	100
	4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.232.639.000,00	3.106.300.000,00	126.339.000,00	5 ASN, 85 Non ASN	5 ASN dan 85 Non ASN	100
	5 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.052.030.000,00	749.937.350,00	302.092.650,00	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK, 2 Orang Verifikabr/Bln	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK, 2 Orang Verifikabr/Bln	100
	6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	303.500.000,00	301.604.550,00	1.895.450,00	10 Dokumen	10 Dokumen	100
	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	289.500.000,00	287.872.400,00	1.627.600,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	8 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	306.000.000,00	233.774.909,00	72.225.091,00	2 Laporan	2 Laporan	100
	9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	330.200.000,00	329.611.350,00	588.650,00	3 Laporan	2 Dokumen	100
	iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	876.028.000,00	708.644.645,00	167.383.355,00	100	100	100
	10 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	230.000.000,00	221.309.795,00	8.690.205,00	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	1 Save Deposit Box/bulan	100
	11 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	315.028.000,00	156.513.600,00	158.514.400,00	1 Laporan	1 Laporan	100
	12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	331.000.000,00	330.821.250,00	178.750,00	4 Laporan (21 Unit Kendaraan Dinas)	1 Laporan	100
	iv Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	1.088.900.000,00	940.099.400,00	128.800.600,00	100	90	90
	13 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	217.000.000,00	216.997.000,00	3.000,00	40 orang/stel	40 Orang/stel	100
	14 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan	380.900.000,00	369.787.100,00	11.112.900,00	3 Laporan	3 Laporan	100
	15 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	271.000.000,00	269.365.300,00	1.634.700,00	13 Laporan	13 Laporan	100
	16 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	83.950.000,00	116.050.000,00	15 orang	9 orang	60
	v Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.859.883.000,00	12.754.658.942,00	105.224.058,00	100	100	100
	17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	880.125.000,00	875.828.500,00	4.296.500,00	41 jenis (2 pake)	2 Paket/Tahun	100
	18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.334.228.000,00	5.325.808.200,00	8.419.800,00	4 Jenis Paket	4 Jenis Paket	100
	19 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.985.720.000,00	2.984.779.385,00	940.615,00	3 Jenis Paket	3 Jenis Paket	100
	20 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.120.000.000,00	1.110.399.162,00	9.600.838,00	40 jenis yang dicetak, 45.000 counter	40 jenis yang dicetak, 45.000 counter	100
	21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	205.000.000,00	203.705.000,00	1.295.000,00	7 surat kabar (untuk 7 bidang/bulan)	7 surat kabar (untuk 7 bidang/bulan)	100
	22 Fasilitas Kunjungan Tamu	443.000.000,00	442.760.500,00	239.500,00	10.000 tamu	10.000 tamu	100
	23 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.283.810.000,00	1.213.044.895,00	70.765.305,00	150 dalam daerah, 250 luar daerah	150 dalam daerah, 250 luar daerah	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu P-APBD (Rp)	Realisasi	Sisa Anggaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)		
					Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8
	24 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	192.000.000,00	189.600.700,00	2.399.300,00	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100
	25 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik pada SKPD	416.000.000,00	408.732.800,00	7.267.200,00	7 Aplikasi	7 Aplikasi	100
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.504.800.000,00	1.379.132.666,00	125.667.334,00	100	100	100
	26 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	30.435.000,00	9.565.000,00	6.000 surat	6.000 surat	100
	27 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.464.800.000,00	1.348.697.666,00	116.102.334,00	4 Rekening Listrik, 24 Telepon, 3 Air, 5 Internet	6 Rekening Listrik, 12 Telepon, 6 Air, 12 Internet	100
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.250.454.413,00	4.145.883.424,00	104.570.989,00	100	100	100
	28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	678.604.920,00	670.944.923,00	7.659.997,00	21 unit Roda 4, 20 Unit Roda 2	21 unit Roda 4, 20 Unit Roda 2	100
	29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	541.320.380,00	503.842.501,00	37.477.879,00	21 unit Roda 4, 4 Unit Roda 2	21 unit Roda 4, 4 Unit Roda 2	100
	30 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.273.000.000,00	1.221.152.500,00	51.847.500,00	4 Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis peralatan dan mesin lainnya	100
	31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.757.529.113,00	1.749.943.500,00	7.585.613,00	2 Unit Gedung Kantor, 3 Unit Rumah Dinas, 1 Gudang Arsip	2 Unit Gedung Kantor, 3 Unit Rumah Dinas, 1 Gudang Arsip	100
ii	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.581.409.798.699,00	4.308.041.040.752,25	273.368.757.946,75	100	99	99,55
i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.586.850.000,00	4.270.286.461,00	316.563.539,00	100	100	100
	32 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	416.000.000,00	411.594.012,00	4.405.988,00	115 Buku KUA & PPAS dan Ranc. KUA & PPAS	115 Buku KUA & PPAS dan Ranc. KUA & PPAS	100
	33 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	401.000.000,00	386.539.044,00	14.460.956,00	110 Buku Perubahan KUA & PPAS dan Ranc. Perubahan KUA & PPAS	110 Buku Perubahan KUA & PPAS dan Ranc. Perubahan KUA & PPAS	100
	34 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.596.000.000,00	1.304.549.320,00	291.450.680,00	125 Buku Raperda, Perda dan Rapergub, Pergub	125 Buku Raperda, Perda dan Rapergub, Pergub dan 60 Buku Surat Edaran	100
	35 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	626.000.000,00	620.812.730,00	5.187.270,00	125 Buku Raperda, Perda dan Rapergub, Pergub	125 Buku Raperda, Perda dan Rapergub, Pergub dan 60 Buku Surat Edaran	100
	36 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.547.850.000,00	1.546.791.355,00	1.058.645,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100
ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.620.692.000,00	1.506.852.127,00	113.839.873,00	100	99	99,00
	37 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	398.000.000,00	395.928.135,00	2.071.865,00	17 SK	16 SK	100
	38 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	683.000.000,00	652.141.971,00	30.858.029,00	17 SK	14 SK	97
	39 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	539.692.000,00	458.782.021,00	80.909.979,00	17 SK	17 SK	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu P-APBD (Rp)	Realisasi	Sisa Anggaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)		
					Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8
iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.929.722.129,00	1.672.947.961,00	256.774.168,00	100	100	100
40	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	626.000.000,00	558.069.249,00	67.930.751,00	36 Dokumen	36 Dokumen	100
41	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	140.722.129,00	105.980.414,00	34.741.715,00	12 Dokumen Pencairan SMI	12 Dokumen Pencairan SMI	100
42	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	326.000.000,00	269.764.000,00	56.236.000,00	18 Dokumen	18 Dokumen	100
43	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemanfaatan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	341.000.000,00	305.724.798,00	35.275.202,00	4 Dokumen dan 44 OPD	4 Dokumen dan 44 OPD	100
44	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	496.000.000,00	433.409.500,00	62.590.500,00	538 Dokumen	538 Dokumen	100
iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.432.500.000,00	1.316.268.417,00	116.231.583,00	100	100	100
45	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	480.500.000,00	428.884.649,00	51.615.351,00	16 Buku	16 Buku	100
46	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	506.000.000,00	455.033.818,00	50.966.182,00	1 Laporan	1 Laporan	100
47	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	446.000.000,00	432.349.950,00	13.650.050,00	1 Raperda Pertanggungjawaban	1 Raperda Pertanggungjawaban	100
v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.571.840.034.570,00	4.299.274.685.786,25	272.565.348.783,75	100	98	98,75
48	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembiayaan Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.900.000.000,00	2.786.684.555,00	113.315.445,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100
49	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.147.561.993.237,00	1.896.976.798.838,25	250.585.194.398,75	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	95,00
50	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21.794.414.409,00	82.301.295,00	21.712.113.114,00	5 Dokumen	5 Dokumen	100
51	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	2.399.583.626.924,00	2.399.428.901.098,00	154.725.826,00	16 Dokumen	16 Dokumen	100
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.822.575.000,00	4.749.520.936,00	1.073.054.064,00	100	97	97,78
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.822.575.000,00	4.749.520.936,00	1.073.054.064,00	100	97	97,78
52	Penyusunan Standar Harga	655.000.000,00	457.166.194,00	197.833.806,00	4 Buku (44 OPD)	4 Buku (44 OPD)	100
53	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	110.971.500,00	23.635.800,00	87.335.700,00	41 Laporan	41 Laporan	100
54	Penatausahaan Barang Milik Daerah	530.550.000,00	505.330.218,00	25.219.782,00	41 SK Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan	41 SK Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan	100
55	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.523.325.000,00	1.157.026.631,00	366.298.369,00	41 OPD	3 OPD	80,00
56	Penilaian Barang Milik Daerah	406.028.500,00	331.287.541,00	74.740.959,00	133 Laporan Penilaian BMD	133 Laporan Penilaian BMD	100
57	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	728.900.000,00	692.736.483,00	36.163.517,00	Sertifikat BPKB, Pengamanan BMD	Sertifikat BPKB, Pengamanan BMD	100
58	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	934.800.000,00	651.159.790,00	283.640.210,00	40 SK/MoU/PKS (Kerjasama)	32 SK/MoU/PKS (Kerjasama)	100
59	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	726.000.000,00	725.552.599,00	447.401,00	41 Lap. Rekon PerTW, 40 BA Rekon OPD dan 362 BA Rekon SMA/SMK/SLB	41 Lap. Rekon PerTW, 40 BA Rekon OPD dan 362 BA Rekon SMA/SMK/SLB	100
60	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	207.000.000,00	205.625.680,00	1.374.320,00	1 Laporan	1 Laporan	100
Jumlah : 60 sub kegiatan		4.630.859.842.112,00	4.354.791.090.090,25	276.068.752.021,75			98,63

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV TA.2024

Berdasarkan realisasi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dari tabel 3.11 diatas diperoleh kesimpulan bahwa semua program dan kegiatan seluruhnya sudah dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pencapaian pelaksanaan realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan persentase mencapai sebesar **94,04%** dengan progres fisik mencapai **98,63%**.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah khususnya dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, salah satunya dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan merujuk kepada hasil yang akan dicapai. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja secara terus menerus. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, Sarana dan Prasarana, serta dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

3.4 Inovasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Aplikasi SIAP SUMSEL guna peningkatan tata kelola barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3.5 Penghargaan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan fungsinya dalam urusan penunjang urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan, diantaranya melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah serta melaporkannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta melaporkannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bahan/materi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI guna memperoleh penilaian/opini atas penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang keuangan, yang merupakan tolok ukur atas kinerja keuangan daerah. Pada Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke sepuluh sejak tahun 2014.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga meraih Peringkat IV Kategori A “Memuaskan” atas Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

3.1 Gambar Piagam Penghargaan Audit Sistem Kearsipan



Piagam Penghargaan juga diberikan kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sebagai ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inovatif.

3.2 Gambar Piagam ASN Inovatif



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP ini memuat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. Secara umum Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp4.354.791.090.090,25 atau 94,04% dari target belanja yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar Rp4.630.859.842.112,00,

Dengan realisasi fisik mencapai 98,63%. Bahwa jika dibandingkan Capaian Indikator Kinerja dengan anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran BPKAD memiliki tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang tinggi dengan tingkat efisiensi lebih tinggi dari 1 (satu), sehingga secara umum kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun ini dapat mendukung terselesaikannya isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

4.2 Langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, akan melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Evaluasi berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan guna meningkatkan capaian indikator tujuan/sasaran sesuai Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
2. Meningkatkan koordinasi dan terus membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat.

3. Masing-masing bidang perlu melakukan pengawasan/pengendalian internal serta meningkatkan kapasitas SDM masing-masing guna mengawal capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
4. Masing-masing pelaksana kegiatan lebih cermat dalam mengisi capaian output kegiatan, sehingga laporan yang tersusun benar-benar menggambarkan realisasi fisik dan kinerja suatu kegiatan.
5. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini perlu digunakan dalam perbaikan perencanaan, pengukuran dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja organisasi dan penilaian kinerja.

Dengan demikian, terhadap hal-hal tersebut di atas, diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan/sasaran/indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada khususnya serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya.

Palembang, 03 Februari 2025
Kepala,



YOSSI HERVANDI, S.E., M.M.
PEMBINA TK I /IVb
NIP. 198208162001121004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	